

PERAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DIGITAL *DIFA CITY TOUR* (OJEK DIFA) TERHADAP KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS DI YOGYAKARTA

Ririn Nopiah¹⁾, Puji Amalia Islami²⁾

¹⁾Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Indonesia

ririn_nopiah@unib.ac.id

²⁾ Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

pujiamaliaislami@ugm.ac.id

ABSTRACT

The digital economy has become an online platform for all social economic activities especially Indoneisa. Platform online have become a necessity for every individual's life. The existence of the digital economy is a business opportunity as a digital tools to improve business performance and interact with consumers. In addition, the digital economy provides open access for everyone including for people with disabilities. Ojek Difa is one of the digital-based innovations pioneered by people with disabilities as inclusive-based online transportation services. Ojek Difa is expected to be able to improve the social and economic welfare of ppeople with disabilities. The method used in this research is descriptive qualitative by in-depth interview. The results of the study indicate that Ojek Difabel has a major influence on increasing the economic degree of the income of workers (with disabilities). The results showed an increase in the percentage of 27.3% in income more than Rp. 1,000,000 and 45.5% in the range of income from more than Rp. 500,000 to Rp. 1,000,000 after the presence of Ojek Difa.

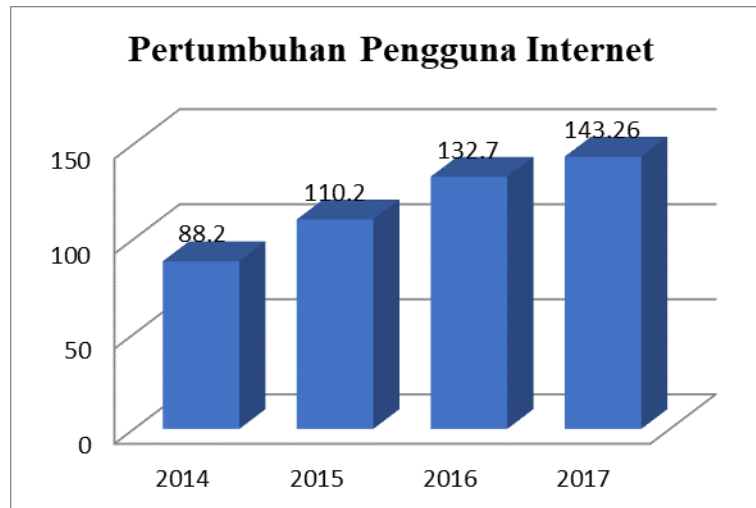
Keywords : Digital Economy, Ojek Difa, Welfare, People With Disabilities, Transportation online

PENDAHULUAN

Ekonomi digital secara sempit didefinisikan sebagai “platform online”. Dalam arti luas, seluruh kegiatan yang menggunakan data digital merupakan bagian dari ekonomi digital (IMF, 2018, h.7). Ekonomi digital didasarkan pada teknologi digital untuk melakukan bisnis melalui internet. Di Indonesia, ekonomi digital terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penetrasi pengguna internet tahun 2017 mencapai 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68 persen dari total populasi penduduk indonesia lebih kurang 262 juta jiwa (Asosisasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia / APJI, 2017, h.6).

Indonesia sangat berpotensi besar terhadap penggunaan jasa internet. pada tahun 2014, penggunaan internet sebesar 88,2 juta jiwa dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2015 sebesar 110,2 juta jiwa. Hasil survei terakhir dari APJI yaitu tahun 2017 telah mecapai 143,26 juta jiwa. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital ini juga ditandai dengan

semakin berkembangnya bisnis ataupun transaksi perdagangan menggunakan layanan internet baik sebagai media komunikasi, kolaborasi dan kerjasama antar individu atau kelompok (Sayekti N, 2018, h.19).



Gambar 1.1. Pertumbuhan Penggunaan Internet Indonesia Tahun 2014 - 2017

Sumber : Data diolah

Di Indonesia, para pelaku bisnis semakin menyadari bahwa internet dan perangkat digital lainnya dapat meningkatkan kinerja usahanya (Deloitte, 2015 dalam Slamet dkk, 2016, h.137). Selain itu, aplikasi *mobile messaging*, *E-commerce* dan media sosial lainnya menjadi media penting bagi pelaku bisnis guna berinteraksi dengan konsumennya. *E-Commerce* merupakan bagian dari proses sosial yang luas yang dicirikan dengan globalisasi pasar, pergeseran menuju ekonomi berdasarkan pengetahuan dan informasi serta semakin dominannya teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Straub M, 2003, h.3).

Ekonomi digital memberikan peluang dan ruang akses terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebagian besar difabel memiliki kecenderungan yang “eksklusif” ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan diri sehingga menjadikan difabel minim akses informasi. Minimnya hal itu, akan berpengaruh pada keadaan sosial dan ekonomi dari difabel terutama untuk membuka jaringan sosial (*social net working*) yang sangat penting akan akses dunia kerja (Setyaningsih & Gutama, 2016, h.34).

Jumlah penyandang disabilitas ditetapkan sebesar 15 % (persen) dari jumlah total populasi di Indonesia (WHO, 2011, h.29). Penyandang disabilitas sering kali mendapat hambatan dalam aktivitas ekonomi yaitu aksesibilitas publik, pemberian kuota ketenagakerjaan hanya 1% dari 100 tenaga kerja di perusahaan (UU No. 8 Tahun 2016) dan keterbatasan modal untuk memiliki usaha mandiri (UKM).

Keberadaan ekonomi digital memberikan peluang dan solusi bagi penyandang disabilitas guna peningkatan kesejahteraan secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Salah satu peluang tersebut berupa sosial kewirausahaan. Sosio-kewirausahaan tidak hanya mengukur kinerja tetapi juga diukur dengan kontribusinya dalam meningkatkan aspek sosial sehingga berfokus pada proses dan perilaku (Passer & Smith dalam Wiguna & Manzilati, 2014, h.12). Orientasi sosio-kewirausahaan ini memiliki fokus utama pada proses dan perilaku, menempatkan upaya untuk menciptakan perbaikan sosial. Dalam perspektif islam, penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kaum mustad'afin yaitu mereka yang berada dalam posisi “minoritas” (qalil), rentan terhadap penindasan terstruktur baik oleh kebijakan politik, ekonomi, dan sosial serta kaum yang berupaya untuk mengangkat derajat dan martabat (Baidhawiy, 2007, h.8).

Ojek difa (*Difa City Tour*) di Yogyakarta merupakan solusi inovasi berbasis digital yaitu *start up business*. Ojek Difa menyediakan akses layanan transportasi publik bagi para difabel dan masyarakat umum lainnya (Octastefani & Kusuma, 2017, h.365). Meskipun Ojek difa terinspirasi dari kehadiran bisnis *start up* Go-jek dan Grab, ojek difa memiliki keistimewaan dari desain kendaraan, pelaku tenaga kerja, dan layanan yang ditawarkan serta menjadi inovator pertama di dunia yang mengangkat kesejahteraan para penyandang disabilitas di wilayah Yogyakarta. Maka dari itu, peneliti ingin melihat peran dari pemanfaatan ekonomi digital yang telah dijalankan Ojek Difa terhadap kesejahteraan akses ekonomi dan sosial penyandang disabilitas di Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan adalah kemampuan masyarakat dalam usaha memandirikan dirinya sendiri dengan adanya pendampingan atau fasilitasi dari pelaku pendamping. Tujuan yang di capai dalam pemberdayaan ini adalah bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, dalam bertindak berpikir dan berperilaku. Kemudian pemberdayaan sendiri menurut Merriam Webster dalam Erni (2012, h.1) kata pemberdayaan di ambil dari Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: 1) *to give power atau authority to* atau memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; 2) *to give ability to atau enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan atau keperdayaan.

Pemberdayaan kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan suatu kelompok masyarakat agar dapat berperilaku sesuai dengan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Menurut Munawar (2011, hal.1) Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 aspek :

1. Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
2. Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo dalam Kurniawati (2013) menyatakan bahwa partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dalam proses pemberdayaan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan ini adalah peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengoptimalisasian sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Masyarakat yang diberdayakan sebagian besar adalah masyarakat yang teridentifikasi sebagai masyarakat marginal

(terpinggirkan), tidak memiliki daya, kekuatan, kemampuan serta modal yang memadai untuk keberlangsungan hidup dan bersaing di dalam masyarakat serta jarang mendapat sentuhan langsung oleh pemerintah setempat. Menurut Suharto dalam Ayundari (2015, h.29) Terdapat beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang lemah atau kurang berdaya diantaranya sebagai berikut :

1. Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan khusus.
2. Kelompok lemah secara psikologis, yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
3. Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal, dan asset yang mampu menopang kehidupannya.
4. Kelompok lemah secara struktural, yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, gender, etnis, orientasi seksual, maupun pilihan politik.

Pemberdayaan hadir atas ketidakberdayaan masyarakat secara sosial, budaya, politik dan ekonomi, sehingga menjadi suatu hal yang biasa ketika ada beberapa kelompok masyarakat dalam suatu daerah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dalam satu cakupan wilayah. Kondisi inilah yang menjadikan adanya dan perlu adanya pembersayaan terhadap masyarakat. Wujud dari keberdayaan sejati adalah kepedulian, kejujuran, bertindak adil, tidak mementingkan diri sendiri, dan sifat-sifat lainnya. Manusia yang berdaya tidak akan merusak dan merugikan orang lain. Namun, bagaimana dirinya bias bermanfaat bagi orang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW “Sebaik-baiknya Manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.

Permasalahan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah masalah pembangunan ekonomi. Hal ini didukung oleh adanya arus globalisasi dan MEA yang sudah mulai terlihat di Negara ini, sehingga memudahkan batas antara Negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu Negara dilihat dari perkembangan ekonomi yang ada di Negara tersebut. Ketimpangan yang terjadi di kota dan desa, terpinggirkan nya masyarakat-masyarakat marginal sehingga kurang tersentuh oleh pemerintah, menjadikan desa ini tertinggal dan menghambat pembangunan ekonomi. Sehingga penggalan potensi desa ataupun masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan melakukan pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi ini menjadikan masyarakat yang mandiri dalam hal ekonomi, bebas dari ketergantungan, serta terciptanya inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembang perekonomian melalui usaha yang akan di inisiasi oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan ini sangat di perlu (Ayundari, 2015, h.27). Dukungan terhadap masyarakat dalam proses pemberdayaan ini dilakukan secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi lebih memfokuskan proses belajar masyarakat untuk lebih mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat tersebut. Pemberdayaan ekonomi ini mencakup fasilitas-fasilitas keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat yang akan di dampingan oleh pelaku fasilitasi.

Upaya paling pokok dalam pemberdayaan ekonomi ini adalah meningkatkannya taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi informasi, lapangan pekerjaan, pasar) serta pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat di jangkau oleh masyarakat yang keberadaannya sangat kurang (Noor, 2011, h.9). Dengan melakukan upaya pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat ini kedepannya, masyarakat dapat secara mandiri untuk mengambil keputusan, melakukan pengembangan dirinya melalui wawasan, ilmu, dan pelatihan yang didapatkan. Sehingga tujuan akhir dari hal tersebut adalah terciptanya masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan kurang sempurnanya atau keterbatasan pada dirinya secara fisik. Definisi atau pengertian terhadap penyandang disabilitas, dapat dilihat dari konteks UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (UU No 8 tahun 2016, h.2).

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. (Perda DIY No. 4 tahun 2012, h.3). World Health Organization (WHO) (Merdias, 2013 h.2) mendefinisikan kecacatan dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Impairment , adalah hilangnya atau tidaknormalan struktur atau fungsi psikologis, fisik atau anatomi.
- b. Disability, mengacu kepada keterbatasan kemampuan untuk melakukan aktivitas secara “normal” yang disebabkan oleh impairment .
- c. Handicap, merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang yang diakibatkan oleh impairment dan disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal dalam konteks usia, jenis kelamin, social budaya maupun ekonomi.

WHO merevisi konsep ini menjadi International Classification of Functioning Disability and Health (ICF). Pada konsep ini, impairment bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi fokus dalam menilai keberfungsian kemampuan seseorang. Ada dua komponen utama yang perlu dipelajari dalam memahami masalah difabel, yaitu:

1. Functioning (keberfungsian), meliputi keberfungsian badan/anatomi dan struktur serta aktivitas dan partisipasi.
2. Disability (ketidakmampuan), bagian pertama meliputi keberfungsian badan/anatomi dan struktur serta aktivitas dan partisipasi, sedangkan bagian kedua terdiri dari faktor-faktor kontekstual, seperti faktor lingkungan dan faktor –faktor yang sifatnya personal.

Difabel merupakan ketidakmampuan atau keterbatasan seseorang akibat adanya tidaknormalan atau hilangnya struktur, fungsi psikologis, dan anatomis untuk melakukan aktivitas yang dianggap normal bagi manusia. Di mata hukum, difabel mempunyai hak yang sama dengan orang lain sesuai yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1997 dimana difabel seharusnya memiliki akses yang setara dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, serta akses ke fasilitas-fasilitas termasuk layanan-layanan umum. Disabilitas mempunyai banyak wajah dan terdapat dalam banyak bentuk, setiap individu mengalami integrasi dan peminggiran secara berbeda-beda. (Setyaningih dan Gutama, 2016, p.3).

Jumlah difabel yang terdata di Indonesia adalah tuna netra $\pm 1.749.981$ jiwa, tuna rungu wicara ± 602.784 jiwa, tuna daksa $\pm 1.652.741$ jiwa, dan tuna grahita ± 777.761 Jiwa (Departemen Sosial 2011). Jumlah tersebut terbilang tinggi, bahkan belum termasuk penyandang cacat yang belum terdata. Berdasarkan angka yang ditetapkan oleh WHO

(World Health Organization) terdapat 15% penyandang disabilitas di Indonesia, dengan demikian terdapat populasi mencapai 36 juta lebih dari populasi penduduk Indonesia ± 245 juta (WHO 2012).

Ketika kita merujuk pada Al-qur'an dan Hadist, Kaum Difabel termaksud kepada golongan kaum Dhuafa dan kaum mustad'afin. Kaum dhuafa dan mustad'afin adalah manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaa, ketertidasan. Ada beberapa ayat yang menjelaskan arti kata dhuafa dan mustadh'afin seperti firman Allah pada surat An-nisa ayat 9 yang artinya hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat yang merujuk kepada kata mustadh'afin diantaranya;

Berdasarkan pernyataan ayat atas orang-orang masuk dalam golongan dhuafa dan mustad'afin adalah orang yang : 1) Lemah Ekonominya; 2) hidup tergantung pada belas kasih oranglain; 3) tidak memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan; 4) menderita dan mendapatkan musibah; 5) tidak mampu mencari rezeki; 6) tidak memiliki tempat tinggal yang permanen; 7) karena uzur dan lemah; 8) kehilangan mata pencarian; 9) penghasilan yang rendah yang tidak mencukupi. Melihat pengertian dari penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus dalam menjalani kesehariannya, maka difabel termaksud dalam kaum dhuafa dan mustad'afin (Sibromalisi,2013).

Ekonomi Difabel

Manusia tidak dapat dijauhkan dari dengan yang namanya ekonomi dan konsumsi, karena manusia membutuhkan makanan untuk melanjutkan kehidupan. Dan melaksanakan keputusan-keputusan ekonomi secara rasional dan untuk meningkatkan utilitas yang individu itu miliki. Penyandang disabilitas sebagai konsumen juga melakukan kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan, dengan barang dan jasa yang disediakan oleh produsen. Individu dapat memenuhi kebutuhan dengan menggunakan pendapatan yang individu itu miliki. Seperti yang diterangkan pada teori ekonomi mikro bahwa seseorang melaksanakan keputusan pembelian atau konsumsi harus dengan cara yang rasional,

sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seseorang tersebut.

Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi (Priyono, 2006. h.51) yaitu :

1. Bahwa konsumen selalu mencoba untuk memaksimalkan kepuasannya dalam batasan-batasan kemampuan finansialnya.
2. Bahwa konsumen mempunyai pengetahuan tentang beberapa alternatif sumber untuk memuaskan kebutuhannya.
3. Bahwa konsumen selalu bertindak secara rasional.

Pada *National Council on Disability* (2011) mengungkapkan bahwa hasil ketenagakerjaan penyandang disabilitas begitu memprihatinkan, termasuk kurangnya kesadaran di kalangan pengusaha karena dianggap memberikan deficit pada produktivitas dan tingkat diskriminasi yang cukup tinggi. Dalam UU No.8 Tahun 2016 bagian pengaturan bidang ketenagakerjaan adalah :

1. Didasarkan pada hak (Human right)
2. Pemerintah, pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan Penyandang disabilitas 2% dari pegawai
3. Swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 1% dari total pegawai
4. Terdapat insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mempunyai hak untuk bekerja di sektor ekonomi.

Transportasi Inklusif

Aksesibilitas pelayanan publik yang didalamnya termaksud layanan transportasi merupakan hal yang penting dalam membantu akses manusia untuk mengakses dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Transportasi sendiri memiliki pengertian sebagai pemindahan manusia atau barang menggunakan wahana yang digerakan oleh manusia atau mesin. Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang mana *trans* berarti mengangkat atau membawa. (Andriansyah,2015).

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dan merupakan fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang dan meningkatkan aksesibilitas atau hubungan satu daerah dengan daerah lain. Transportasi yang baik adalah layanan publik yang bisa dengan mudah diakses oleh siapapun. Namun beberapa tahun belakangan ini, transportasi sebagai layanan publik tidak ramah terhadap masyarakat yang termarginalkan salah satunya masyarakat desa dan masyarakat penyandang disabilitas. Dalam satu desa, transportasi berperan penting dalam perkembangan wilayah terutama aksesibilitas masyarakat desa ke kota, yang berangkat untuk membelanjakan dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan tidak adanya transportasi yang memadai seringkali masyarakat desa sulit untuk mengakses barang dan jasa yang ada di perkotaan.

Begitu pula dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini sendiri adalah masyarakat yang memiliki kebutuhan yang khusus, terkhusus dalam transportasi. Difabel membutuhkan akses transportasi yang dapat memobilisasi untuk berpindah tepat dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan rasa aman dan nyaman. Hal ini membuat penyandang disabilitas kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang setara dan baik. Beberapa masalah yang diungkapkan Komisi Nasional Difabel berkaitan dengan mobilitas difabel yaitu :

1. Belum adanya perlindungan terhadap penyandang disabilitas pengguna kendaraan pribadi.
2. Penyebrangan masih menyulitkan untuk diakses oleh penyandang disabilitas.
3. Kendaraan yang dimodifikasi kurang dipromosikan penggunaannya serta belum tersertifikasi secara aman.
4. Sebagian besar terminal halte belum memenuhi desain yang aksesibel.
5. Rambu, marka dan informasi belum dapat diterima dan dipahami oleh semua orang.
6. Staff bus belum secara merata mengetahui dan mampu melayani pengguna difabel secara baik dan benar.

Hubungan Ekonomi Digital dan Transportasi

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi semakin berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Indonesia sendiri memiliki potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi digital. Ekonomi digital telah memberikan dampak negatif dan positif bagi pembangunan di Indonesia. Dalam Sayekti (2018, h.1) pada tahun 2017

pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau meningkat 7,96 persen disbanding tahun 2016 sebesar 132,7 juta. Ekonomi digital pertama kali dikenalkan oleh Don Tapscott (*The Digital Economy*, 1995) yaitu sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai ruang intelijen, meliputi informasi, akses instrumen, kapasitas, dan pemrosesan informasi. Munculnya fenomena e-commerce transportasi berbasis online ini menandakan hadirnya aktivitas ekonomi berbasis digital. Secara tidak langsung, dapat dikatakan terjadi perpindahan *culture* dari aktivitas ekonomi manual ke ekonomi serba instan (digital).

Kecanggihan teknologi digital sudah merambah di segala sektor kehidupan saat sekarang ini, seperti di sektor politik, sosial, budaya termasuk sektor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri lagi jika orang-orang membutuhkan alat dan metode yang dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan apa yang diinginkan dengan cepat. Ketika orang-orang yang berada di ranah politik dan sosial, membutuhkan teknologi digital yang bisa menyampaikan informasi terkait dengan isu-isu politik juga isu-isu sosial. Dalam sektor budaya membutuhkan teknologi digital agar keberagaman budaya dapat diperlihatkan ke mancanegara. Demikian pula dalam sektor ekonomi, dimana pebisnis, wirausaha, dan lain-lain membutuhkan teknologi digital agar dapat memasarkan barangnya dengan cepat dan informatif. Sehingga respon dari konsumen dan permintaan konsumen dapat langsung oleh pelaku usaha.

Ekonomi digital merupakan suatu hal yang menandakan pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dengan pesat. Pelaku usaha saling bersaing dan saling berkolaborasi satu dengan yang lain agar mendapatkan profit yang tinggi. Ini merupakan sisi baik dari adanya teknologi digital, masyarakat dapat menggunakannya untuk melakukan perdagangan dan promosi, juga menjadikannya sebagai sarana informasi. Contohnya seperti Gojek yang merupakan layanan transportasi digital. Namun disisi lain ekonomi digital bisa berdampak buruk melihat belum meratanya akses informasi maupun teknologi di Indonesia, sebagian wilayah yang belum tersentuh oleh pembangunan dan terjadinya kesenjangan digital sehingga tidak bisa merasakan adanya kemajuan teknologi digital.

Dengan adanya berbagai macam kemajuan teknologi di bidang IT, ini memiliki banyak manfaat salah satunya terciptanya lapangan pekerjaan bagi semua lapisan masyarakat.

Contoh kecilnya yaitu perusahaannya *Start-up* Gojek yang tidak hanya menyediakan layanan transportasi namun juga berbagai jasa pembayaran dan layanan lainnya. Terciptanya layanan-layanan transportasi seperti Gojek ini memudahkan dan membantu mobilitas masyarakat yang sulit untuk mendapatkan kendaraan jika ingin pergi ke suatu tempat. Sehingga berkolaborasinya digital ekonomi dan layanan transportasi ini semakin memudahkan manusia dan tidak lagi menunggu lama untuk mendapatkan transportasi.

Dalam tatanan kehidupan manusia yang semakin kompleks, bidang jasa adalah salah satu sektor yang berkembang pesat. Hal ini dikarenakan permintaan dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. Sektor transportasi yang termasuk dalam sektor jasa ini penyumbang PDB yang cukup tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Dalam artikel FMEI (Forum Mahasiswa Ekonom Indonesia, 2016), berdasarkan data yang dikeluarkan oleh CIA (*Central Intelligence Agency*) Amerika Serikat tahun 2015, sektor jasa berkontribusi besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia, sebesar 43,6%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif guna mengetahui peran keberadaan ekonomi digital dan Ojek Difa terhadap kesejahteraan ekonomi sosial penyandang disabilitas. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer merupakan data yang bersumber secara langsung dari responden. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 22 responden. Responden dalam penelitian ini merupakan para tenaga kerja aktif dan pengurus Ojek Difa Yogyakarta. Metode analisis data yaitu dengan pemberian kuesioner dan wawancara secara langsung melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*) yang diajukan oleh peneliti kepada setiap responden penelitian. Selain itu, dilakukan metode pengamatan atau observasi pada kegiatan Ojek Difa Yogyakarta yang dipergunakan sebagai informasi tambahan terkait dari objek yang diteliti. Selanjutnya, hasil pengamatan diinterpretasikan melalui analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik

Ojek Difa atau *Difa City Tour* merupakan satu-satunya layanan transportasi publik online yang dikelola oleh penyandang disabilitas (difabel). Ojek Difa memelopori lahirnya

layanan transportasi yang inklusif di Yogyakarta. Selain sebagai jasa transportasi, juga sebagai peningkatan kemandirian kaum penyandang disabilitas karena tenaga kerja yang disediakan merupakan penyandang disabilitas itu sendiri. Pelayanan yang ditawarkan Ojek Difa yaitu berupa aplikasi online dari *smartphone* yang digunakan untuk memesan layanan Ojek Difa secara online. Aplikasi tersebut dapat di unduh melalui Google Play atau App store. Layanan yang ditawarkan antara lain :

1. Difa City Tour, yaitu melayani tour keliling kota Yogyakarta dengan harga terjangkau bagi wisatawan.
2. Transportasi (Ojek Difa), yaitu layanan jasa antar jemput bagi siapa saja baik difabel maupun masyarakat umum.
3. Kargo, yaitu layanan jasa pengiriman barang dalam kota atau provinsi sampai tujuan dengan aman dan tepat waktu.
4. Pindah Kos (Angkut), yaitu layanan jasa siap angkut pindah kos-kosan atau rumah dengan aman dan sampai tempat tujuan.
5. Massage (Pijat Tuna Netra), yaitu layanan pijat tuna netra yang akan memudahkan aktifitas para konsumen.

Tabel 1.1 Penerapan Sistem Pembagian Bagi Hasil Ojek Difa

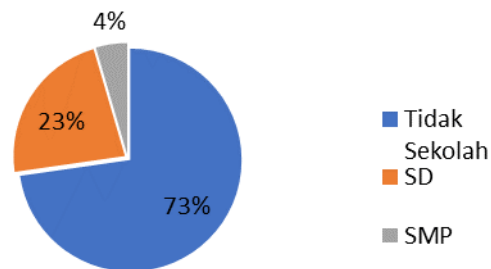
Keterangan	Manajemen	Pengemudi/Pemijat
Transportasi (Ojek Difa)	10%	90%
Difa City Tour	30%	70%
Kargo	10%	90%
Massage (Pijat)	10%	10% Pengemudi
		80% Pemijat

Sumber : Data diolah

Dengan sistem pembagian bagi hasil di atas, pihak manajemen, pengemudi maupun penumpang mendapat manfaat dan tidak dirugikan terutama bagi kesejahteraan para tenaga kerja. Langkah keberadaan Ojek Difa ini membuka kesempatan akses difabel dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan partisipasi ketenagakerjaan yang melibatkan masyarakat penyandang disabilitas. Inovasi ini dapat dijalankan karena perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital menjadi peluang inovasi bisnis bagi difabel untuk

mampu berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang produktif kepada komunitas difabel di Yogyakarta.

Tingkat Pendidikan (Responden)



Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan (Responden)

Sumber : Data diolah

Sebagian besar responden tidak memiliki pendidikan (tidak sekolah) yaitu sebesar 73 % atau 16 responden. Sebanyak 23% atau 5 responden memiliki pendidikan terakhir pada tingkat sekolah dasar (SD). Sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama terdapat 4% atau 1 responden dari 22 responden yang diteliti.

Pembahasan

Analisis data dilakukan kepada responden yang terdiri dari 100 persen merupakan laki-laki dimana responden sebanyak 22 orang. Selain itu responden merupakan pegawai atau tenaga kerja yang bekerja pada layanan jasa online Ojek Difa. Berdasarkan hasil analisis *interview* responden didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu :



Gambar 1.3 Bentuk Perubahan Sosial dan Ekonomi setelah adanya Ojek Difa

Sumber : Data Interview di Olah

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial yang diterima oleh responden setelah menjadi bagian Ojek Difabel cukup signifikan. Dampak tersebut antara lain keinginan difabel dalam menggunakan kemampuan dirinya untuk mencapai kesejahteraan yang disimbolkan dengan aktualisasi diri, rasa kepercayaan diri difabel setelah berada di Ojek Difa, *mindset* masyarakat umum terhadap kemampuan difabel sebagai masyarakat rentan dan termarginalkan mengalami perubahan, keterlibatan difabel dalam kegiatan lingkungan dan sosialnya, perubahan gaya bahasa interaksi dan komunikasi serta style, dan *networking* yang semakin luas dan perhatian penuh dari beberapa lembaga atau instansi-instansi tertentu.

Dampak ekonomi yang dialami responden yaitu kepemilikan akun tabungan yang dimiliki responden. Kepemilikan akun tabungan memperlihatkan bahwa terjadi perubahan ekonomi yaitu kegiatan *saving* (tabungan) yang sebelumnya 22 responden belum memiliki akun sebelum adanya Ojek Difabel. Hal ini menandakan adanya perubahan pendapatan secara signifikan dan pola konsumsi difabel yang berubah menjadi lebih baik tanpa bergantung terhadap orang yang mendampinginya. Begitu pula dengan status pernikahan difabel, 20 responden mengungkapkan bahwa mereka berani melaksanakan salah satu ibadah yaitu menikah setelah mereka bekerja di Ojek Difa. Hal ini tentu menggambarkan bahwa setelah adanya ojek difa, menumbuhkan rasa kesiapan, rasa tanggung jawab dan kemampuan menafkahi seseorang atau orang lain dengan perubahan pendapatan saat ini.

Tabel 1.2 Pendapatan Per Hari sebelum dan sesudah adanya Ojek Difa

Pendapatan	sebelum	Persentase (%)	sesudah	Presentase (%)	Peningkatan/ Penurunan (%)
100.000-500.000	22	100	6	27,3	(72,7)
>500.000-1.000.000	0	0	10	45,4	45,4
>1.000.000	0	0	6	27,3	27,3

Sumber : Data diolah

Pendapatan difabel per hari sebelum adanya Ojek difa antara Rp100.000 (terendah) dan Rp500.000 (tertinggi). Tetapi, setelah adanya Ojek Difa, pendapatan meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari presentase perubahan peningkatan dan penurunan sebelum dan sesudah adanya Ojek Difa. 22,8 % responden membuktikan mampu memperoleh pendapatan lebih dari Rp1000.000 dan 31,8 % responden lainnya dapat memperoleh perubahan pendapatan sebesar lebih dari Rp500.000 sampai dengan

Rp1.000.000. selain itu, terjadi penurunan dratis pada pendapatan lebih dari Rp100.000 sampai dengan Rp500.000 yaitu sebesar 54,5% sehingga ini dapat mengidentifikasi bahwa setelah adanya Ojek Difa memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas yang berpartisipasi sebagai tenaga kerja.

Tabel 1.3 Pengaruh Keberadaan Ojek Difa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Difabel

Jawaban	Jumlah Orang	Persentase (%)
Tidak Berpengaruh	0	0
Berpengaruh	22	100

Sumber : Data diolah

Tabel diatas, menyatakan bahwa semua responden merasa memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan difabel dari adanya Ojek Difa. Hal ini dikarenakan keadaan setelah bergabung dengan Ojek Difa memiliki peningkatan dalam hal pendapatan dari sebelumnya. Selain itu, secara sosial mereka (penyandang disabilitas) yang sebelumnya merasa kurangnya kesamaan hak dan diskriminasi aksesibilitas menjadi lebih percaya diri dan mengalami peningkatan kemandirian atau aktualisasi diri untuk dapat *men-survive* kehidupannya. Hal ini sesuai dengan teori schumpeter yang menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para innovator atau entrepreneur (wiraswasta). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan ekonomi digital memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui inovasi layanan jasa transportasi online yaitu Ojek Difabel. Selain itu, adanya Ojek Difa dapat mengangkat derajat ekonomi dan sosial penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak, kesetaraan, aksesibilitas, kesejahteraan dan kemandirian difabel. Pengaruh keberadaan Ojek Difa tersebut membangun variasi pendapatan penyandang disabilitas menjadi meningkat secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan presentase pendapatan pada *range* Rp100.000 sampai dengan Rp500.000 sebesar 72,7% dan mengalami peningkatan presentase sebesar 27,3 % pada pendapatan

lebih dari Rp1000.000 serta 45,5 % pada *range* pendapatan lebih dari Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kedalaman pertanyaan informasi wawancara yang masih dapat diteliti lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini belum menganalisis data secara metode regresi disebabkan keterbatasan jumlah minimal responden ($n < 30$) dan keterbatasan data sekunder. Maka dari itu rekomendasi penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode analisis regresi dengan melihat dampak atau pengaruh ojek difa terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah. (2015). *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik : Universitas Prof. Dr. Moestop Beragaman.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI). (2017). *Infografis : Penetrasi dan Perilaku Penggunaan Jasa Internet Indonesia 2017*.
- Ayundari,R. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelopmok Bhakti Manunggal di Dusun Tulung Desa Srihardono Pundong, Bantul*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga.
- Baidhawry, Z. (2007). Pemberdayaan Mustad'afin Melalui Filantropi Islam. *Jurnal Shabran*. 20(1).
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Ekonomi untuk mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(2).
- International Monetary Fund (IMF). (2018). *Ingatkah Indonesia Soal Revolusi Digital*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/18/02/27/p4slrx383-imf-ingatkan-indonesia-soal-revolusi-digital>.
- International Monetary Fund (IMF). (2018). *Measuring The Digital Economy*. Washington D.C. Februari 28.
- Katsir, I.(1996). *Ibnu Tafsir : Kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim*. Jilid 8, 1996 : 319.
- Kurniawati, D.P. (2013). Pembersyaan Masyarakatdi Bidang Usaha Ekonomi (Studi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) . *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 9-14.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*,1(2),87-99.
- Octastefani, T., & Kusuma, B. MA. (2017). *The Rising of Ojek Difa as Subject in Providing Inclusive Public Transportation Service for Yogyakarta Indonesia*.

- Center for Southeast Asian Social Studies, UGM. International Conference The 5th AASIC.
- Prihantoro, S. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo kabupaten Purworejo). *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, NFECE* 2(2).15-21.
- Priyono, E. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Konsumen dalam Memilih Kafe di Kota Surakarta. *Jurnal BENEFIT*, 10(1). 49-65.
- Rahayu, S, dkk. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 108-119.
- Sayekti, N.W. (2018). Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia. *INFO Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis)*, (10)5.
- Setyaningsih, R., & Gutama, Th. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), 42-52.
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, R., Ramdani, H., Hendriyanto, A., & Ilma, L. (2017). Strategi Pengembangan UKM Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(2), 136-147
- Straub, M. (2003). E-Commerce and Development : Whose Development?. *The Electronic Journal on Information System in Developing Countries*. (11)2,1-5.
- Surwanti, A., & Hindasah, L. (2013). *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Laporan Hibah Bersaing. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- National Council on Disability. (2011). *The Power of Digital Inclusion: Technology's Impact on Employment and oppoutunities for People with Disabilities*.
- Naskah Online Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf
- Website Resmi Ojek Difa. www.difacitytour.com.
- Wiguna, A., & Manzilati, A. (2014). Social Entrepreneurship and Socio-entrepreneurship : A study with Economic and Social Prespective. The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business (IICIES 2013). *Journal Procedia Social and Behavioral Sciences*.
- Widjajanti, K. (2010). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12(1),15-27.
- Zimmerman, M.A., & Perkins, D.D. (1995). Empowerment theory, Research, and application. *American Journal Of Communcaty Psychology*, 23(5), 569-579. Research Library care pg. 569
- World Health Organization. (2011). *World Report on Disability 2011*.